

EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN SOSIAL TUNAI (BST)

SELAMA MASA PANDEMI COVID-19

(Studi Kasus Di Desa Lalong Kecamatan Lembor Selatan Kabupaten Manggarai Barat)

Dominika V.M Marni , Dewi Suprobowati

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Wijaya Putra

vivimarni3@gmail.com¹, dewisuprobowati@gmail.com²

Abstrak

Penelitian ini berjudul tentang “efektivitas program bantuan sosial tunai (BST) selama masa pandemi covid-19 di desa lalong kecamatan lembor selatan kabupaten manggarai barat”. penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan teori efektivitas dengan tiga fokus yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi untuk mengukur seberapa efektifnya program BST di desa lalong. Berdasarkan Hasil dari penelitian ini membahas sesuatu yang mengenai data yang di peroleh oleh peneliti dalam penelitian melalui wawancara sebagai data primer, dokumentasi serta observasi dilapangan dan dilakukan oleh peneliti. Berikut data temuan peneliti program BST ini ada yang namanya pembagian pertahap. Tahap awalnya yang diterima masyarakat itu senilai Rp 1.200.000 rupiah itu untuk 2 bulan, tahap kedua senilai Rp. 6.00.000 rupiah itu yang diterima oleh masyarakat selama 3 bulan, dan tahap yang ketiga senilai Rp. 300.000 rupiah itu nominal yang diterima oleh masyarakat selama 4 bulan. Selanjutnya bantuan yang diterima masyarakat bukan lagi berupa uang melainkan dialihkan ke bantuan sembako”.

Kata kunci: Efektivitas, Program BST Desa Lalong.

Abstract

This research is entitled "the effectiveness of the cash social assistance (BST) program during the COVID-19 pandemic in Lalong Village, South Lembor District, West Manggarai Regency". The research used in this research is descriptive research using a qualitative approach. This study uses effectiveness theory with three focuses, namely goal achievement, integration, and adaptation to measure how effective the BST program is in Lalong Village. Based on the results of this study, it discusses something about the data obtained by researchers in research through interviews as primary data, documentation and field observations and carried out by researchers. The following is the data found by the researchers of the BST program, there is what is called a gradual division. The initial stage that the community received was Rp. 1,200,000 rupiah for 2 months, the second stage was Rp. 6,000,000 rupiah is received by the community for 3 months, and the third stage is worth Rp. 300,000 rupiah is the nominal received by the community for 4 months. Furthermore, the assistance received by the community is no longer in the form of money but is transferred to basic food assistance”.

Keywords: Effectiveness, Lalong Village BST Program.

Pendahuluan

Pada awal tahun 2020, dunia mengalami bencana pandemi *corona virus disease 2019* (covid-19) peyebaran *virus corona disease 2019* (covid-19) membawa risiko bagi kesehatan masyarakat bahkan telah merenggut korban jiwa bagi yang terinfeksi di berbagai belahan penjuru dunia, termasuk di Indonesia. Pandemi *corona virus disease 2019* (covid-19) juga secara nyata telah mengganggu aktivitas ekonomi dan membawa implikasi besar bagi perekonomian sebagian besar nagara-negara di seluruh dunia, termasuk indonesia. Perkembangan *corona virus disease 2019* (covid-19) juga berpotensi mengganggu aktivitas perekonomian di Indonesia. Bentuk implementasi dikeluarkannya beragam bentuk program bantuan sosial yang mana salah satu adalah program bantuan sosial tunai (BST) yang diatur oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat tentang luncurkan penyaluran BBPPKM tahun 2021. Meluncurkan Penyaluran Bantuan Beras Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (BBPPKM) tahun 2021 bagi keluarga penerima manfaat bantuan sosial tunai (KPM BST) di kabupaten manggarai barat. Diakses, berita portal.manggaraiarakab.go.id 23/07/2021.

Desa lalong adalah salah satu desa di kecamatan lembor selatan kabupaten manggarai barat. Selama masa pandemi Covid-19 masyarakat desa lalong yang terdampak Covid-19. Terlebih khusus masyarakat desa lalong yang perekonomiannya rendah dan kebanyakan masyarakat desa lalong tergolong keluarga menengah atau bisa dikatakan dari keluarga kurang mampu dan masyarakat desa lalong juga mayoritas petani. Dengan adanya program bantuan sosial tunai selama pandemi Covid-19. Itu sangat membantu masyarakat desa lalong yang terdampak Covid-19, untuk mengatasi permasalahan perekonomian masyarakat desa. Namun program bantuan sosial tunai tidak selamanya membantu kesulitan warga masyarakat desa lalong atau bergantung pada bantuan sosial tunai dari dinas sosial maupun dari pemerintah. Masyarakat desa lalong berharap Covid-19 ini cepat berlalu supaya masyarakat bisa melakukan aktivitas seperti sedia kala. Alasan saya memilih lokasi penelitian di desa lalong, kecamatan lembor selatan, kabupaten manggarai barat karena saya sangat tertarik dengan permasalahan-permasalahan yang ada di desa lalong terkait efektivitas program bantuan sosial tunai.

Perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Manggarai Barat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, terhitung sejak tahun 2016-2020 penduduk manggarai barat yang miskin masih bergerak dalam kisaran angka sekitar 49.400 orang. Berdasarkan rusan masalah dalam penelitian ini 1. Bagaimana efektivitas program bantuan sosial tunai selama masa pandemi covid-19 di desa lalong kecamatan lembor selatan kabupaten manggarai barat? 2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas program bantuan sosial tunai selama masa pandemi covid-19 di desa lalong kecamatan lembor selatan kabupaten manggarai barat?. maka tujuan penelitian adalah 1. untuk mengetahui bagaimana efektivitas program bantuan sosial tunai selama masa pandemi covid-19 di desa lalong kecamatan lembor selatan kabupaten manggarai barat. 2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas program bantuan sosial tunai selama masa pandemi covid-19 di desa lalong kecamatan lembor selatan kabupaten manggarai barat. Tinjauan Pustaka yang digunakana

dalam penelitian ini adalah Teori Efektivitas. Efektivitas berasal dari kata efektif yang dalam bahasa Inggris *effective* yang berarti berhasil atas sesuatu yang dilakukan dengan baik. Dalam KBBI diartikan sebagai pelayanaan dan kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan rencana yang disusun.

Kerangka Teori

Adapun Teori kebijakan publik menurut beberapa ahli, Gerston menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan upaya yang dilakukan oleh Pejabat pemerintah pada setiap tingkatan pemerintahan untuk memecahkan masalah publik dan menjelaskan bahwa proses penentuan suatu kebijakan mencakup lima tahapan, yaitu mengidentifikasi isu-isu kebijakan publik, mengembangkan proposal kebijakan publik, melakukan advokasi kebijakan publik, melaksanakan kebijakan publik, dan mengevaluasi kebijakan yang dilaksanakan. Sedangkan menurut Dunn kebijakan publik merupakan pola yang kompleks dari pilihan kolektif yang saling terkait oleh badan dan lembaga pemerintah. Menurut Ealau dan Prewitt dalam Suharto, kebijakan adalah ketetapan yang berlaku oleh sikap yang tidak berubah-ubah serta kesekian, baik dari pihak yang membuatnya ataupun pihak yang menaatinya. Titmuss mendefinisikan kebijakan selaku prinsip-prinsip yang mengendalikan aksi yang ditunjukkan pada tujuan-tujuan tertentu. Oleh karena itu, suatu kebijakan pada dasarnya adalah suatu ketentuan yang menjadi pedoman atau arahan bagi setiap usaha untuk mencapai suatu tujuan, sehingga setiap kegiatan mempunyai tindakan yang jelas.

Kebijakan adalah peraturan yang memuat berbagai prinsip pedoman cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu. Adapun istilah Publik (*public*) memiliki pengertian yang sangat bervariasi menurut pengertian umum, masyarakat, dan negara. Publik dalam pengertian “umum” atau masyarakat, misalnya *public offering* (penawaran umum), *public ownership* (milik umum), *public utility* (perusahaan umum), *public relations* (hubungan masyarakat), *public service* (pelayanan masyarakat) dan *public interest* (kepentingan umum). Adapun dalam pengertian “negara” ialah *public authorities* (otoritas negara), *public building* (bangunan negara), *public revenue* (penerimaan negara), dan *public sector* (sektor negara). Menurut James Anderson yang dikutip Suharno (2010:24-25), menyampaikan jenis kebijakan yaitu, politik substansial dan politik prosedural. Politik substansial adalah politik yang mempengaruhi tindakan pemerintah. Kebijakan prosedural adalah cara untuk mengimplementasikan kebijakan penting, kebijakan distribusi dan regulasi dan kebijakan redistribusi kebijakan distribusi berkaitan dengan distribusi layanan atau manfaat kepada masyarakat. Pedoman regulasi berupa larangan atau larangan

terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat. Kebijakan redistribusi, di sisi lain, mengatur distribusi penghasilan, pendapatan, properti, maupun kekuasaan di antara kelompok masyarakat, politik material dan politik simbolik. Politik material adalah politik yang memberikan kelompok sasaran penggunaan sumber daya secara penuh. Kebijakan simbolik, ialah kebijakan yang membawa arti simbolis kepada kelompok sasaran, dan kebijakan barang publik (public goods) dan barang privat (private goods). Kebijakan barang publik adalah kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang publik.

Adapun lima model kebijakan publik yang dikemukakan oleh para ahli yaitu Model Kebijakan, ditinjau dari aspek corak yang dikemukakan oleh Salisbury dan Heiz (Sharkansky, 1975) model kebijakan ini menjadi empat corak. Corak yang pertama adalah kebijakan Distributif, ialah kebijakan yang menyampaikan hasil kepada suatu kelompok atau lebih. Kebijakan ini dibuat karena dasar adanya prosedur permintaan atau permohonan yang berjalan ataupun permasalahan yang dipandang relevan dengan kebutuhan sasaran kebijakan. Contohnya, kebijakan pemerintah dalam memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada warga miskin, atau kebijakan pemerintah tentang pendidikan gratis untuk tingkat sekolah dasar dan menengah. Corak yang kedua, kebijakan Redistributif, yaitu kebijakan yang memilah kembali sehingga memberikan hasil terhadap satu maupun sebagian kelompok sehingga menimbulkan kerugian terhadap kelompok lain. Satu pihak diberi keuntungan, tetapi pihak lain harus dikorbankan. Contohnya, kebijakan pengurangan pajak bagi suatu perusahaan yang merugikan perusahaan lain.

Corak kebijakan yang ketiga adalah kebijakan Regulatory, yaitu kebijakan yang mengatur pemberian pembatasan terhadap perbuatan maupun perilaku dari satu atau lebih kelompok sehingga mengabaikan atau mengakui perolehan hasil tertentu untuk kelompok tertentu meskipun secara tidak langsung. Contohnya, kebijakan kuota yang sebenarnya merupakan kebijakan yang secara tidak langsung perolehan hasil bagi para jemaah haji sebab memberikan jaminan atas pengaturan yang baik. Corak yang keempat adalah kebijakan Self-regulatory, yaitu kebijakan yang mengatur pribadi sendiri menentukan juga pembatasan terhadap perbuatan maupun tindakan dari satu atau lebih kelompok. Contohnya kebijakan desentralisasi dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Selanjutnya Model Kebijakan ditinjau dari aspek formal yang dikemukakan oleh Dunn (1981), model kebijakan dibagi menjadi dua jenis, yang pertama Sinopsis Kebijakan, yaitu kebijakan yang menunjukkan perbandingan rasional. Model kebijakan ini meyakini bahwa segala sesuatu selalu didasarkan pada

pertimbangan rasional. Kedua adalah kebijakan inkremental, yang merupakan kebijakan dominan dalam praktiknya tetapi tidak banyak dijelaskan dalam literatur. Inkremental artinya meningkat secara bertahap. Kebijakan inkremental pada praktiknya dapat dipahami sebagai pembuatan kebijakan anggaran pendapatan dan belanja suatu negara, yang memperhitungkan pengetahuan yang terbatas tentang sumber pendapatan yang tepat dan jumlah pendapatan untuk memberikan kesan skeptis.

Selanjutnya aspek tipologi model kebijakan yang dikemukakan oleh Henry (1980), yaitu model yang dianalisis dari perspektif proses, yaitu model kelembagaan yang menitikberatkan pada struktur organisasi pemerintahan, misalnya peraturan pemerintah atau kebijakan pemerintah dalam bentuk hukum. Kedua, model massa elit ini merupakan model kebijakan yang bersumber dari dominasi kelompok elit tertentu atas kepentingan dan posisi masyarakat luas. Ketiga model kelompok tersebut adalah kebijakan yang didasarkan pada kepentingan kelompok, dan konflik kepentingan akan muncul ketika kebijakan dirumuskan atau dilaksanakan di bawah pengaruh kepentingan yang berbeda. Model sistem keempat adalah strategi yang didasarkan pada pendekatan sistem dinamis, yaitu strategi yang terbentuk harus diawali dengan adanya masukan (input) dan kemudian menjadi keluaran (output). Model kebijakan yang dianalisis dari sudut hasil. Pertama, model deskriptif yaitu model yang menjelaskan serta memprediksi faktor dan pengaruh dari pilihan kebijakan. Model ini digunakan untuk memantau hasil dari langkah-langkah kebijakan. Kedua, model normatif adalah model yang tidak hanya didasarkan atas penyajian apa adanya, tetapi juga memberikan pernyataan-pernyataan yang seharusnya dilakukan. Ketiga, model strategi dari perspektif perubahan isi perubahan konten yang diharapkan, model strategi dapat muncul perubahan keseluruhan yang komprehensif dalam waktu yang cepat dan model mengalami perubahan dengan tahapan yang cepat.

Kebijakan yang berubah dengan cepat disebut sebagai kebijakan dengan model radikal, yaitu model perubahan yang komprehensif atau keseluruhan sistem yang berlaku untuk semua aspek dalam lingkup isi kebijakan. Perubahan bertahap disebut model reformis, yaitu model perubahan lambat dalam beberapa aspek yang melibatkan perubahan fungsi, posisi dan kebijakan pemerintah persatuan nasional yang ditentukan oleh kebijakan pemerintah reformis. Dan terakhir Model kebijakan pengambilan keputusan yang dikemukakan oleh Dror (1968), yaitu model kebijakan perumusan atau pengambilan keputusan, meliputi lima model kebijakan yaitu model rasional ekonomi, model keputusan sekuensial, model kepuasan,

model hiper-model rasional dan model optimal. Penelitian yang relevan adalah penelitian yang sudah ada sebelumnya, penelitian tersebut memiliki hubungan dan kesamaan dengan penelitian yang sedang berlangsung saat ini. Adapun beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian adalah sebagai berikut: Penelitian yang berjudul “Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Perumahan Taman Cikande, Jayanti Tangerang” oleh Nindya Cahya Rosadi pada Tahun 2021. Penelitian ini menggunakan Pendekatan Kualitatif dengan jenis Penelitian Deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian Bantuan Sosial Tunai di Perumahan Taman Cikande, Jayanti Tangerang tepatnya RT 02 RW 03 sudah efektif atau sesuai dengan indikator efektivitas yang digunakan, yakni tercapainya tujuan (waktu dan sasaran), terlaksananya proses integrasi, serta adanya adaptasi di masyarakat. Namun, walaupun tidak dapat memenuhi kebutuhan selama satu bulan penuh pemberian Bantuan Sosial Tunai ini juga tidak membuat masyarakat menjadi pasif atau hanya mengandalkan uang bantuan saja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Penelitian di atas, memiliki persamaan dengan penelitian yang peneliti dilaksanakan, karena sama-sama meneliti terkait efektivitas bantuan sosial di masa Pandemi Covid-19. Penelitian yang berjudul “Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid19 Di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan” oleh Carly Erfly Fernando Maun pada Tahun 2020. Pada penelitian ini terdapat konsep efektivitas, program Bantuan Langsung Tunai (BLT), konsep kemiskinan, dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa efektivitas program ini khususnya bagi masyarakat miskin yang dirasakan sangat bermanfaat bagi mereka, dan sebagian besar masyarakat mendukung program yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan adalah bahwa BLT Dana Desa dari Kementerian Desa sedangkan BST merupakan bantuan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kementerian Sosial mengeluarkan kebijakan di masa pandemi Covid-19 berupa program bantuan sosial untuk diberikan kepada masyarakat miskin yang berdampak wabah pandemi Covid-19 ini. Salah satu bentuk programnya ialah Bantuan Sosial Tunai (BST), yang diberikan pada rakyat miskin, pengangguran, dan masyarakat kurang mampu yang terkena dampak merebaknya pandemi Covid-19. Bantuan tersebut diberikan kepada 9.000.000 kepala keluarga dengan nilai Rp. 600.000 /bulan untuk jangka waktu 3 bulan, mulai April 2020 sampai Agustus 2021 senilai Rp. 300.000/bulan. Daerah penerima BST sebanyak 9.000.000 KK di 33 Provinsi yang ada di Indonesia. Kriteria yang mendapatkan BST adalah KK dan usulan lainnya dari berbagai

daerah yang pernah tercantum di Data Komprehensif Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI atau disebut DTKS. Ada dua cara untuk penyaluran BST. Yaitu, melalui saluran BST tingkat komunitas yang menyalurkan BST melalui saluran BST Pos dan PT. POS Indonesia, melalui rekening KPM (keluarga penerima manfaat) lalu melalui Himbara (Perhimpunan Perbankan Negara).

Metode Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif bermakna bahwa penelitian yang dilakukan menggunakan konteks alamiah dengan tujuan untuk mengartikan apa yang terjadi dan dilakukan dengan berbagai metode yang ada (Albi Anggito & Jolan Setiawan, 2018:7). Penelitian ini sering disebut dengan penelitian lapangan yang mana bersifat deskriptif, yaitu untuk memberikan data dari adanya proses pelaksanaan bantuan sosial dari pemerintah bagi masyarakat yang terdampak covid-19 yang terjadi di Desa Lalong Kecamatan Lembor Selatan Kabupaten Manggarai Barat.

Desa Lalong merupakan salah satu dari Desa yang berada di wilayah Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT, dengan Jarak tempuh 12 Km dari Kota Kecamatan dan 77 Km, dari Kota Kabupaten Manggarai Barat. Pembentukan Desa Lalong dimulai pada tahun 1958 yang dipimpin oleh Alm. Bpk. Eduardus Fernandez, sampai dengan Tahun 1965, Kemudian dari Tahun 1965 sampai dengan 1975 dipimpin oleh Alm. Bpk Petrus Baut, setelah itu dipimpin Oleh Alm. Bpk Damianus Jelaman dari Tahun 1975 sampai dengan Tahun 1985. Kemudian pada Tahun 1985 sampai dengan 1993 dipimpin Oleh Kepala Desa bernama Martinus Hambut dan di Tahun 1993 sampai Tahun 1995 dipimpin Oleh PJ Bpk Yosef Wanggur, lalu dari Tahun 1995 sampai Tahun 2003 dipimpin Oleh Bpk. Laurensius Lukas, kemudiaan dari Tahun 2003 sampai 2004 dipimpin. Ketua Panitia. Bpk Agustinus Joreng dari Tahun 2004 sampai Tahun 2010 dipimpin Oleh Bpk Daniel Jemalu, dari tahun 2010 bulan Juni sampai bulan Desember 2010 dipimpin oleh Pj Bpk Emanuel Jemadi dari Tahun 2011 sampai Tahun 2015 di pimpin oleh Bapak Laurensius Lukas, dari tahun 2016 di pimpin oleh Bapak. Pj. Wilhelmus Yance, SE. dari tahun 2017 di pimpin oleh Bapak Laurensius Kasmir Jon sampai sekarang. Dalam roda pemerintahan desa lalong yang di pimpin oleh kepala desa Laurensius K. Jon dibantu oleh sekretaris, kaur tata usaha dan umum, kaur keuangan, kaur perencanaan, kasih pemerintahan, kasih kesejahteraan, kasih pelayanan dan 4 kepala wilayah, 3 staf dan 9 kepala RT, 4 ketua RW. Selain itu dibantu juga oleh badan permusyawaratan desa (BPD).

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut Wawancara, oservasi, serta dokumentasi penelitian yang dilakukan terkait Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai Selama Masa Pandemic Covid-19 Di Desa Lalong,

Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat. Berdasarkan data penelitian diatas yang sudah efektif mengenai program bantuan sosial tunai (BST) selama masa pandemi covid-19 di desa Lalong melalui hasil penelitian yang meliputi masing-masing dimensi kepuasan masyarakat seperti tabel berikut.

Tabel 1 tabel penilaian program BST di desa lalong

No	Dimensi	Hasil
1.	Pencapaian tujuan	“Iya sudah, karena program bantuan sosial tunai ini sudah berjalan dengan baik dan masyarakat sangat menikmati bantuannya selama pendemi covid-19 ini”. (wawancara dengan bapak Lorensius K. Jon, selaku kepala desa hari senin, 13 juni 2022)
2.	Integrasi	“Iya, Karena program BST ini ada yang namanya pembagian pertahap. Tahap awalnya yang diterima masyarakat itu senilai Rp 1.200.000 rupiah itu untuk 2 bulan, tahap kedua senilai Rp. 6.00.000 rupiah itu yang diterima oleh masyarakat selama 3 bulan, dan tahap yang ketiga senilai Rp. 300.000 rupiah itu nominal yang diterima oleh masyarakat selama 4 bulan. Selanjutnya bantuan yang diterima masyarakat bukan lagi berupa uang melainkan dialihkan bantuan sembako”. (wawancara dengan bapak Yulianus R. Horas, S.Pd selaku sekretaris hari selasa, 21 juni 2022)
3.	Adaptasi	“Tidak ada kendala, karena sejauh ini komunikasi antara kami selaku BPD dengan masyarakat sangat baik apapun yang dikelukan masyarakat langsung kami tanggapi lalu menyampaikannya kepada pemerintah desa lalong”. (wawancara dengan ibu Meriana Gorat selaku BPD hari rabu, 15 juni 2022)

Kesimpulan

Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas program bantuan sosial tunai (BST) pemerintah desa dalam memberikan bantuan Kepada Penerima Manfaat Di Desa Lalong, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat yang diukur melalui suatu indeks yaitu kepuasan masyarakat. Dari hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa efektivitas dalam program bantuan sosial tunai sudah dianggap baik. Dengan pengukuran indeks kepuasan masyarakat dengan mempunyai beberapa dimensi yang dimiliki sangat bagus, dan juga sarana dan prasarana yang sangat bagus dan lengkap.

Daftar Pustaka

- Alvonco, johnson. 2014, *practical communication skill*, jakarta: Elex Media Komputindo.
- Alimah, A. R., & Retnasary, M. (2018) *Efektivitas Tayangan Belajar Dari Rumah Di Tvri Sebagai media Pembelajaran Dalam Masa Darurat Covid-19 (Studi Di Desa Mekarrahayu Kab. Bandung)*. Jurnal Jurnalisa: Jurnal Jurusan Jurnalistik, (2018) 6.2.
- Anggito, Albi Dan Jalan Setiawan. (2018). *Metode penelitian kualitatif*, sukabumi: CV. Jejak.

- Anjela, Ririn. (2019) “*Efektivitas Bantuan Dana Tunai Program PKH Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Desa Kuala Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar*”. Skripsi-UIN Sultan Syarif Kasim, Riau.
- Ayu Lestari, (2021) *Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Pemeberdayaan Masyarakat Di Desa Buntuna Kecamatan Baoloan Kabupaten Tolitoli*. *Tolis Ilmiah Jurnal Penelitian*, 3(1), 2021, 24-33
- Bankulu, B., Pankey, M., & Kolondam, H. (2021). *Efektivitas Keluarga Harapan Sektor Pendidikan Di Desa Hatetabako Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmahera Timur*. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(101).
- Fernando Tri Tunjang, 2017. *Perbandingan efektivitas penggunaan media trainer dan perangkat lunak festo fluidsima pada pembelajaran sistem pneumatik di smkn 1 cihami*
- <https://www.kemenkeu.go.id-kementrian-keuangan> Republik Indonesia diakses tahun 2021
- <https://nttpembaruan.com/2021/09/23/jumlah-penduduk-miskin-di-mabar-49-400-orang/> diakses hari kamis, 23/09/2021
- <https://portal.mangaraibarakab.go.id/wakil-bupati-mabar-luncurkan-penyaluran-bbppkm-tahun-2021/> diakses, 23/07/2021
- Maun, C. E. Fernando (2020) *Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan*. *Jurnal Politico*, 2020, 9(2).
- Mursyidah , L. (2017). *Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai Bersyarat Mengatasi Krmiskinan Dan Kelaparan*. *JMKP (jurnal kebijakan dan manajemen publik)*, 5(2), 245-260.
- Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease (Covid-19).
- Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang desa, desa merupakan unit komunitas hukum dengan batas-batas wilayah yang memiliki wewenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan di hormati dalam Sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Panduan pedoman penulisan skripsi Program Studi Ilmu Administrasi Publik Univesitas Wijaya Putra Surabaya Tahun 2022

Retnaningsih, Hartini. 2020. *Bantuan sosial pekerja ditengah pandemi covid-19: sebuah analisis terhadap kebijakan sosial pemerintah*. Jurnal masalah-masalah sosial 1, vol. 11, no.2, 215-227.